

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Berdasarkan data Hasil Sensus Penduduk pada tahun 2020, jumlah penduduk keseluruhan di Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan SP2020 tersebut telah bertambah sebanyak 32,56 juta jiwa jika dibandingkan dengan hasil SP2010. Indonesia merupakan negara dengan luas dataran sebesar 1,9 juta km², maka memiliki kepadatan penduduk Indonesia mencapai 141 juta per km². Negara Indonesia yang memiliki keutuhan wilayah dari Sabang sampai Marauke, memiliki 34 provinsi dengan masing-masing ibu kota pada setiap provinsi yang ada di Indonesia. Negara Indonesia yang terdiri dari Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Nusa Tenggara dan Bali, Pulau Sulawesi, dan Pulau Maluku dan Papua. (Sumber : *bps.go.id*).

Negara Indonesia terdiri dari 34 Provinsi yang memiliki kebebasan dalam mengatur daerahnya sendiri terutama dalam mengelola keuangan daerah secara mandiri (Ni Putu & Ida, 2018). Kebijakan otonomi dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah, sehingga sistem pemerintahan yang ada di Indonesia yaitu sistem sentralisasi berubah menjadi sistem desentralisasi (otonomi daerah). Dengan adanya otonomi daerah maka dapat terdistribusikan kewenangan pengelolaan pemerintah dari pusat kepada daerah, agar proses pembangunan yang berlangsung dapat diselesaikan tanpa menunggu bantuan pendanaan yang diberikan pemerintah pusat. Menurut Joice & Lukfiah (2018), Salah satu yang dapat mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan yaitu dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana pendapatan asli daerah sebagai komponen utama dari penerimaan daerah akan

sangat membantu menentukan alokasi belanja, sehingga dengan meningkatnya pendapatan asli daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah pada provinsi yang ada di Indonesia.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Negara merupakan suatu wilayah yang ditempati masyarakat yang memiliki organisasi, dimana berfungsi untuk membantu mengurus berbagai kepentingan-kepentingan suatu negara. Organisasi dalam suatu negara yang merupakan lembaga pemerintah bersifat nirlaba, yang dimana Lembaga pemerintah tersebut memiliki peran penting dalam membantu meningkatkan pelayanan untuk memfasilitasi berbagai kepentingan dalam masyarakat yang memiliki dampak terhadap kesejahteraan suatu masyarakat yang dapat dicapai dengan berbagai cara salah satunya yaitu dengan mengelola keuangan pemerintah dengan baik dan bijaksana (Ni Putu & Ida, 2018).

Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya, dapat diukur dari kinerja keuangannya. Seiringan dengan adanya paska reformasi, maka pemerintah pusat memberikan kebijakan otonomi pada masing – masing daerah untuk dapat mengelolah keuangan setiap daerahnya sendiri. Perlunya pengelolaan keuangan secara mandiri oleh Pemerintah daerah agar proses pembangunan yang dilakukan dapat diselesaikan tanpa harus bergantung dengan bantuan pendanaan yang diberikan oleh pusat, maka dari itu pentingnya dilakukan pengukuran kinerja keuangan (Pardomuan & Ade, 2020).

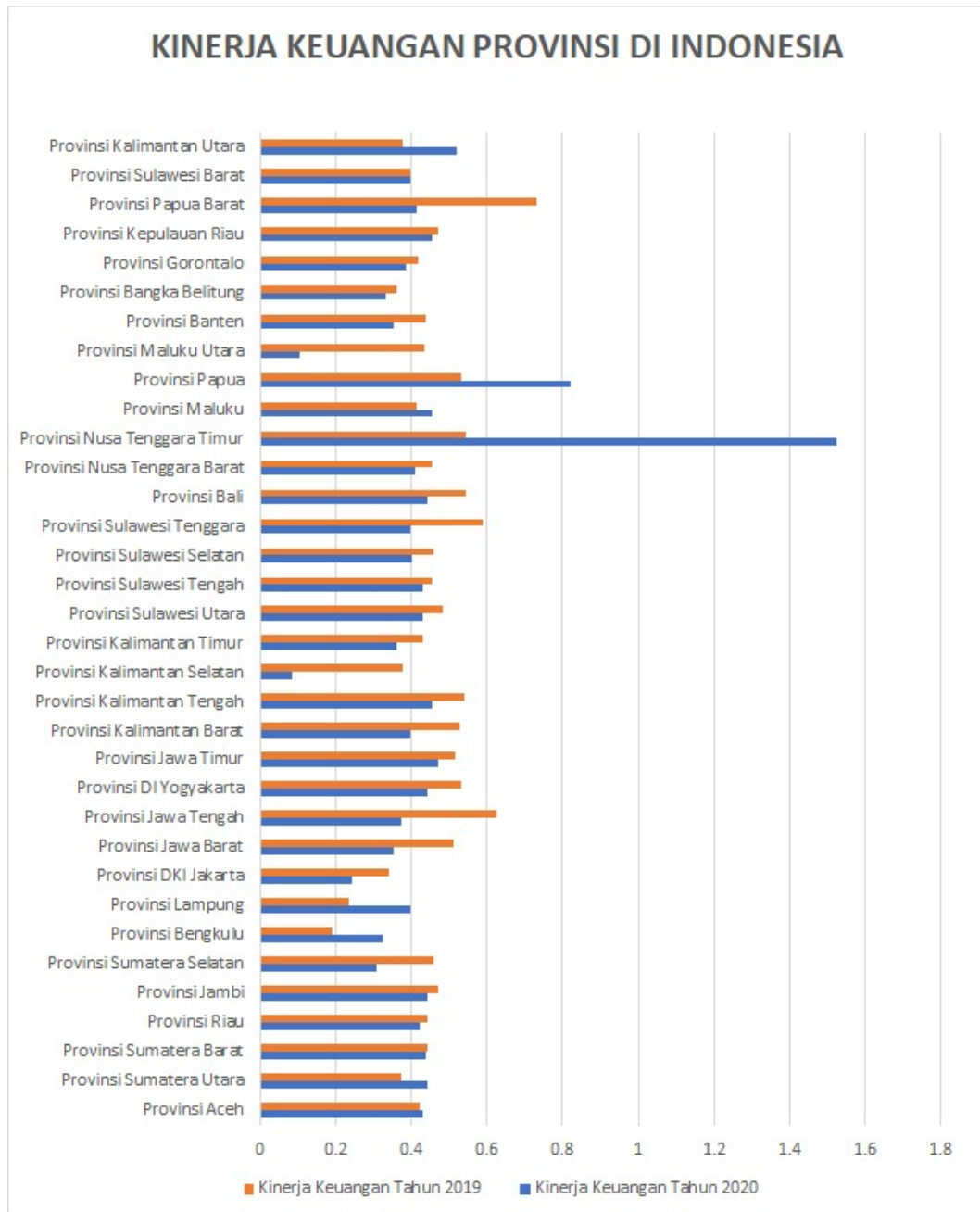
Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Tepatnya pada pasal 1 ayat 2, Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendapatan Daerah merupakan keseluruhan pendapatan yang dimiliki suatu daerah yang bersumber dari beberapa komponen yang menunjang pendapatan serta nilai yang menambah kekayaan suatu daerah.

Bab 1, pasal 1, ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dalam bentuk uang yang termasuk dalam berbagai bentuk kekayaan yang memiliki hubungan dengan hak dan kewajiban daerah yang tertera dalam kerangka APBD. Kinerja menurut kamus akuntansi manajemen dikatakan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu di sebagai bagian dari ukuran keberhasilan dalam pekerjaan. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah merupakan suatu tingkat pencapaian dari hasil kinerja keuangan pemerintah daerah, yang berasal dari anggaran dan realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan menggunakan indikator keuangan yang dimana telah ditetapkan melalui kebijakan serta ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. (bpkad.banjarkab.go.id).

Kinerja keuangan dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dari suatu daerah, dengan pengelolaan keuangan yang baik dapat membantu mengindikasikan kinerja keuangan yang baik pula (Pardumuan & Ade, 2020). Kinerja Keuangan dapat diukur dengan menggunakan beberapa rasio keuangan, diantaranya yaitu rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian keuangan daerah, dalam penelitian ini kinerja keuangan diukur dengan rasio efektivitas dan rasio kemandirian. Rasio efektivitas dapat diukur dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah dapat dikatakan efektif dalam pengelolaan keuangan, jika rasio efektivitas mencapai lebih dari 100% (PuspitaAyu,2018), dan rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam mengelola kegiatan pemerintahan daerahnya sendiri guna untuk meningkatkan pembangunan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan bantuan pemerintah pusat, semakin tinggi rasio kemandirian maka daerah

dianggap semakin mampu untuk membiayai pembangunannya sendiri (Ayu Puspita, 2018)



Sumber : djpk.kemenkeu.go.id (diolah penulis 2021)

Gambar 1. 1 Kinerja Keuangan Seluruh Provinsi di Indonesia.

Pada data gambar 1.1 diatas terdapat data Kinerja Keuangan yang bersumber dari *website* djpk dan telah diolah terlebih dahulu oleh peneliti. Berdasarkan data Kinerja Keuangan provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2019 - 2020, dengan

menggunakan rasio efektivitas terdapat fenomena yang terjadi pada provinsi-provinsi di Indonesia, dimana kinerja keuangan pada provinsi-provinsi di Indonesia jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 kinerja keuangan tahun 2020 mengalami penurunan. Berdasarkan data dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia 76% atau 26 Provinsi dari 34 Provinsi di Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan 24% atau 8 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia tahun 2020 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu provinsi Kalimantan selatan, Provinsi Kalimantan selatan mengalami penurunan dikarenakan terdapat daerah-daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan tidak dapat mencapai target sehingga penurunan yang terjadi berpengaruh dan memberikan dampak kinerja keuangan yang tidak tercapai. Sedangkan menurut Pardomuan & Ade (2020) keberhasilan Pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya, dapat diukur dari kinerja keuangannya, agar proses pembangunan yang dilakukan dapat diselesaikan tanpa menunggu bantuan pendanaan dari pusat oleh sebab itu pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk dilakukan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah menurut penelitian Priyono dkk (2020), antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap kinerja keuangan, menurut Ni Putu & Ida (2018) Pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Menurut penelitian Ayu Puspita (2018) PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Menurut penelitian Joice & Lukfiah (2018) Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Dan menurut penelitian Maulia dkk (2016) Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan beberapa faktor yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana

Perimbangan. Faktor-faktor tersebut peneliti pilih karena berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu masih terdapat perbedaan dari hasil penelitian.

Faktor pertama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), menurut Priyono dkk (2020) pendapatan asli daerah merupakan seluruh penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli dari daerah tersebut. Pendapatan asli daerah salah satu pendapatan selain dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan, penerimaan pendapatan daerah yang meningkat setiap tahunnya menunjukkan bahwa semakin meningkatnya sumber keuangan pada suatu daerah, dimana pendapatan daerah tersebut bersumber langsung dari kegiatan-kegiatan perekonomian daerah, guna untuk membiayai setiap pengeluaran baik pengeluaran secara rutin dan juga dapat dipergunakan untuk biaya pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Mulia dkk, 2016). Pendapatan asli daerah yang merupakan sumber pemasukan suatu daerah yang bersumber dari kegiatan asli daerah, dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah khususnya sumber-sumber pendapatan dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah sehingga dapat diambil kesimpulan semakin meningkatnya pendapatan asli daerah, maka kinerja keuangan juga mengalami peningkatan, begitupun sebaliknya apabila Pendapatan Asli Daerah menurun, maka kinerja keuangan juga menurun. Pada penelitian ini Pendapatan Asli Daerah dilakukan pengukuran dengan kinerja keuangan yang di prosikan dengan rasio efektifitas.

Penelitian menurut (Ni Putu & Ida Bagus, 2018), (Ayu Puspita, 2018), (Budianto & Alexander, 2016), dan (Mulia dkk, 2018) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh efektif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dalam artian Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi efektivitas kinerja keuangan serta mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap pertumbuhan pendapatan daerah. Sedangkan penelitian menurut (Joice & Lukfiah, 2018) Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kedua adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut Priyono dkk (2020) dana alokasi umum merupakan *block grant* yang dimana diberikan kepada seluruh kabupaten dan kota untuk mengisi kesenjangan antara kapasitas dengan kebutuhan

secara fiskal. Menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 yang berisi tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana alokasi umum diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dapat mengurangi kesenjangan fiskal antar satu daerah dengan daerah lainnya, agar memiliki pembangunan yang merata di setiap masing-masing daerah, selain untuk membantu menandai pembangunan, dana alokasi umum juga bertujuan untuk membantu mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, karena apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi dari pendapatan daerah maka akan terjadi defisit, sehingga semakin besar dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat, sehingga semakin rendahnya Dana Alokasi Umum yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Mulia dkk, 2016). Dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga semakin menurunnya dana alokasi umum akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian menurut (Priyono dkk, 2020), (Mulia dkk, 2016), menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) telah mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Sedangkan Penelitian menurut Joice & Lukfiah, (2018) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah,

Faktor terakhir dalam penelitian ini adalah Dana Perimbangan. Menurut Fajariani (2019) Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBD untuk membantu mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai otonomi daerah, terutama untuk dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dana Perimbangan yang merupakan pemberian dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan pembangunan daerah pada setiap masing-masing daerah agar desentralisasi dapat tercapai, dimana dana perimbangan diberikan agar pembangunan di setiap daerah merata dan untuk mengupayakan biaya otonomi daerah (Ayu Puspita, 2018). Dana perimbangan yang

diterima dari pemerintah pusat yang tinggi maka semakin bergantung kepada pemerintah pusat, sehingga semakin rendah dana perimbangan maka semakin tinggi kinerja keuangan.

Dana Perimbangan menurut penelitian (Ayu Puspita, 2018), (Budianto & Alexander, 2016), (Nuwun dkk, 2020) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan penelitian menurut (Andirfa Mulia, 2016), (Verawaty, 2020), menyatakan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan penjelasan dari berbagai hasil penelitian terdahulu, ditemukan ketidak sesuaian antara teori dengan hasil dari penelitian terdahulu, dimana tidak semua kenaikan ataupun penurunan dalam pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana perimbangan mempengaruhi kenaikan atau penurunan dari kinerja keuangan, sehingga hasil penelitian terdahulu menunjukkan ketidak konsistenan hasil penelitian. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan diatas penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Provinsi di Indonesia Tahun 2020)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah merupakan suatu tingkat pencapaian dari hasil kinerja keuangan pemerintah daerah, yang berasal dari anggaran dan realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan menggunakan indikator keuangan yang dimana telah ditetapkan melalui kebijakan serta ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Pada tahun 2020 Kinerja keuangan pemerintah daerah mengalami penurunan. Sebanyak 34 provinsi yang ada di Indonesia rata-rata mengalami penurunan kinerja keuangan, yang berarti target yang ditetapkan pada setiap daerah yang ada di Indonesia tidak dapat tersealisasi dengan baik.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu seperti yang dijelaskan pada latar belakang, memiliki hubungan yang tidak konsisten dari beberapa variabel. Beberapa variabel tersebut antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi

Umum, Dana Perimbangan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat diperoleh beberapa masalah yang dapat diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana perimbangan dan Kinerja Keuangan provinsi di Indonesia tahun 2020?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Kinerja keuangan yang diproksikan dengan rasio efektifitas pada provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2020?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap Kinerja Keuangan yang diproksikan dengan rasio kemandirian pada Provinsi – provinsi di Indonesia tahun 2020?
4. Bagaimana pengaruh secara parsial yang diproksikan dengan rasio kemandirian:
 - a. Dana Alokasi Umum secara parsial terhadap Kinerja Keuangan pada Provinsi – Provinsi di Indonesia tahun 2020 ?
 - b. Dana Perimbangan secara parsial terhadap Kinerja Keuangan pada Provinsi – Provinsi di Indonesia tahun 2020 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang di uraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Perimbangan, dan Kinerja Keuangan provinsi di Indonesia tahun 2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Kinerja Keuangan yang diproksikan dengan rasio efektifitas pada Provinsi – provinsi di Indonesia tahun 2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum, dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap Kinerja Keuangan yang diproksikan dengan rasio kemandirian pada Provinsi – provinsi di Indonesia tahun 2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial yang diproksikan dengan rasio kemandirian:

- a. Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Provinsi – Provinsi di Indonesia tahun 2020.
- b. Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian Kinerja Keuangan pada Provinsi – Provinsi di Indonesia tahun 2020.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dalam bidang akademik mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan, serta mampu memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Perimbangan serta Kinerja Keuangan bagi pemerintahan daerah pada Provinsi-Provinsi yang ada di Indonesia.

1.6 Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka sistematika penulisan penelitian ini secara garis besar terdiri dari lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian mengenai fenomena yang menjadi isu penting agar layak diteliti, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, dan terakhir sistematika tugas akhir yang menjelaskan masing - masing bab secara umum.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai teori – teori yang berkaitan dengan penelitian dan kajian mendukung solusi permasalahan yang ada, selanjutnya kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian sebagai dugaan sementara atas masalah penelitian, serta pedoman untuk menguji data.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bagian yang berisi uraian karakteristik penelitian, alat pengumpulan data, tahapan dalam pelaksanaan penelitian, populasi dan sample, pengumpulan data dan sumber data, teknis analisis, serta pengujian hipotesis penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian tentang hasil dari penelitian dan pembahasan hasil penelitian, mencakup analisis responden terhadap variable penelitian, serta analisis statistic dan analisis pengaruh variable.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian yang berisi kesimpulan secara keseluruhan atas penelitian yang telah dilakukan serta saran yang diberikan peneliti baik dari segi aspek teoritis maupun praktis untuk berbagai pihak.